KHUSUS UNTUK ANGGOTA

BULETIN GINSI JATENG

Edisi November 2016 : 883 TAHUN KE - XXXVIII

NOVEMBER 2016

NOMOR : 883 TAHUN KE - XXXVIII

DAFTAR ISI

- Jurus Pemerintah Tekan Laju Produk Fesyen Impor 2
- Gara-gara Ponsel, Impor RI Oktober 2016 Naik USD11,47 Miliar 3
- Kepemimpinan Trump Tidak Akan Gerus Ekspor Indonesia ke AS 4
- Pengusaha Korea Selatan Keluhkan Pungli di Indonesia 5
- Mendag Jelaskan Kebijakan Impor Sapi 6
- BPS: Oktober 2016, Nilai Ekspor dan Impor Indonesia Naik 7
- Pemerintah Impor Cangkul, Pande Besi Terancam Gulung Tikar 8
- Trade Expo Indonesia Dibuka Jokowi, Targetkan Rp2 Triliun 10
- Blusukan di Mal, Sri Mulyani Dicurhati Soal Tarif Cukai 12
- Sri Mulyani Sebut Indonesia Dilebeli Pasar Barang Bekas 13
- Ironi RI : Negeri Kaya Jeruk, Tapi Jeruknya Banyak yang Impor 14
- Indonesia Akan Bentuk Komite Nasional Fasilitas Perdagangan 17
- Sistem Klasifikasi dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Barang Impor 19
- Deklarasi Inisiatif Pabean 20
- Penghitungan Komponen Lokal Produk Seluler, Komputer Genggam 21

**** dihimpun dari berbagai sumber*

Jurus Pemerintah Tekan Laju Produk Fesyen Impor

Pemerintah terus berupaya menekan laju impor produk fesyen ke pasar dalam negeri. Hal ini menyusul membanjirnya produk pakaian impor yang masuk secara legal maupun ilegal.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Gati Wibawaningsih mengatakan, untuk menghalau serbuan produk fesyen ke Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis guna peningkatan daya saing produk fesyen nasional.

"Pemerintah berkomitmen mengamankan industri fesyen nasional, di antaranya melalui pembatasan pelabuhan impor, *safeguard* bagi industri fesyen serta pemberlakuan SNI," ujar dia di Jakarta, Jumat (11/11/2016).

Gati juga mengimbau kepada para desainer, produsen dan pelaku industri fesyen nasional agar makin meningkatkan penggunaan bahan baku dan aksesoris produk dalam negeri.

"Akan dibuat *material center* yang bekerjasama dengan asosiasi sehingga IKM mendapatkan bahan baku dan bahan penolong dengan harga lebih murah," lanjut dia.

Dalam pengembangan daya saing industri fesyen nasional, lanjut dia, Kemenperin menjalankan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis, pendampingan tenaga ahli, restrukturisasi mesin dan peralatan.

Selain itu juga penumbuhan wirausaha baru serta fasilitasi promosi melalui berbagai pameran dalam dan luar negeri.

"Terkait upaya perluasan pasar, kami akan memfasilitasi melalui e-smart IKM dengan memanfaatkan *marketplace* yang ada sehingga pasar *online* dalam negeri tidak dibanjiri produk impor," kata dia.

Kemenperin mencatat, industri fesyen merupakan salah satu dari 16 kelompok industri kreatif yang berperan penting dalam perekonomian nasional. "Industri fesyen berkontribusi besar terhadap devisa negara, PDB nasional dan penyediaan lapangan kerja," ungkap Gati.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk fesyen pada 2015 mencapai US$ 12,11 miliar atau naik 2,75 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pasar utama ekspor produk fesyen, antara lain Amerika Serikat, Eropa dan Jepang. Sedangkan, jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 1,1 juta orang.

--- (Sumber : http://bisnis.liputan6.com)---

Gara-gara Ponsel, Impor RI Oktober 2016 Naik USD 11,47 Miliar

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai impor Indonesia pada Oktober 2016 naik sebesar 1,55% menjadi USD11,47 miliar. Salah satu pemicunya adalah kenaikan impor golongan mesin dan peralatan listrik, khususnya handphone (HP) atau ponsel hingga 6,25% pada periode tersebut.

Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, nilai impor nonmigas pada Oktober 2016 mencapai USD1,53 miliar atau turun 13,13% dibanding September 2016. Sementara, impor nonmigas naik 4,27% dibanding September 2016 menjadi USD9,94 miliar.

"Barang yang naik besar untuk impor, kenaikan terbesar pada mesin dan peralatan listrik USD80,9 juta (HP) wartawan ganti HP nya sering banget. Tiap minggu ganti," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Secara kumulatif, nilai impor Indonesia dari Januari sampai Oktober 2016 mencapai USD110,17 miliar atau turun 7,50% dibanding periode sama 2015. Penurunan terjadi pada impor migas dan nonmigas masing-masing USD5,8 miliar dan USD3,06 miliar.

"Penurunan impor migas disebabkan turunnya nilai impor minyak mentah USD1,2 miliar, hasil minyak USD4,3 miliar, dan gas USD349,6 juta," imbuh dia.

Adapun tiga negara asal barang impor nonmigas terbesar selama Januari hingga Oktober 2016 adalah China dengan nilai USD24,48 miliar, Jepang senilai USD10,64 miliar, dan Thailand sebesar USD7,30 miliar. Sementara, impor nonmigas dari ASEAN mencapai pangsa pasar 21,77% dan Uni Eropa 9,19%.

"Komposisinya, barang konsumsi selama Januari sampai Oktober 2016 mengalami kenaikan 13,75%. Ini sudah tergambar dari triwulan lalu, sementara bahan baku penolong mengalami penruuann minus 8,6%. Total impor kita sebagian besar untuk bahan baku atau penolong, menyusul barang konsumsi dan barang modal," tandasnya.

--- (Sumber : http://ekbis.sindonews.com) ---

Kepemimpinan Trump Tidak Akan Gerus Ekspor Indonesia ke AS

Badan Pusat Statistik (BPS) meyakini kemenangan Donald Trump dalam Pemilihan Presiden Amerika Serikat (AS) tidak akan menggerus ekspor Indonesia ke AS. Latar belakang Trump sebagai seorang pengusaha diyakini akan memengaruhi pengambilan kebijakan pada periode pemerintahannya nanti.

Deputi Bidang Statistik dan Distribusi Jasa BPS, Sasmito Hadi Wibowo mengakui, Trump memang berasal dari Partai Republik yang terkenal dengan nasionalismenya. Namun, dia juga merupakan pebisnis sehingga kebijakan yang akan diambil pun akan mengutamakan kepentingan dunia usaha.

"Ya memang Donald Trump sangat nasionalis. Tapi dia juga pengusaha, jadi kepentingan bisnis akan mengutamakan bisnis antar negara," katanya di Gedung BPS, Jakarta, Selasa (15/11/2016).

Dalam kampanyenya, sambung Sasmito, Trump memang menyampaikan hubungan antarnegara harus saling menghargai dan adil. Namun dia berkeyakinan, saat implementasi maka kepentingan bisnis dan kepentingan bersama juga akan diperhatikan.

"Saya enggak khawatir ekspor kita ke AS. Saya kira tetap berjalan. Kecuali pada hal tertentu, dalam politik lah," imbuh dia. (Baca: Ekspor Indonesia Oktober 2016 Capai USD12,68 Miliar)

Kepala BPS Suhariyanto menambahkan, AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor terbesar Indonesia. Sejak Januari hingga Oktober 2016, Negeri Paman Sam itu merupakan negara tujuan ekspor terbesar dengan nilai USD12,89 miliar.

"Mudah-mudahan dengan adanya pergantian Presiden, tidak akan berpengaruh kepada ekspor kita ke AS. Karena sekarang porsinya masih besar," tandasnya.

--- (Sumber : http://ekbis.sindonews.com) ---

Pengusaha Korea Selatan Keluhkan Pungli di Indonesia

Presiden Kamar Dagang dan Industri Korea Selatan Lee Kang-hyun mengatakan masalah pungutan liar (pungli) di bidang keimigrasian menjadi salah satu hal yang paling banyak dikeluhkan pengusaha Negeri Ginseng dalam berinvestasi di Indonesia.

Kang-hyun, seusai Forum Investor Korea Selatan di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016, mengatakan keluhan itu tidak hanya berasal dari para investor Negeri Ginseng, tapi juga hampir semua investor asing yang tinggal di Indonesia.

"Sebagai pengusaha atau investor, kami anggap ini kesulitan," katanya.

Kang-hyun mengaku pungli kerap diterapkan dalam kepengurusan administrasi tenaga kerja asing. Meski sudah ada arahan untuk memberantas pungutan liar (pungli), pihaknya tetap khawatir hal itu tetap terjadi karena sistem dan kesejahteraan di Indonesia yang belum optimal.

"Kemarin Pak Jokowi sudah mengumumkan tidak ada pungli lagi, tapi kami khawatir di lapangan tidak seperti itu," katanya.

Ketua Komite Imigrasi dan Pekerja Kadin Korea di Indonesia Kim Min-gyu mengaku salah satu masalah rumit yang kerap mendapat pungli adalah pengurusan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) menjadi Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) yang memerlukan rekomendasi Direktorat Jenderal Imigrasi dan kantor wilayah imigrasi setempat.

Min-gyu mengaku kerap diminta membayar sekitar Rp12 juta hingga Rp18 juta untuk satu tanda tangan rekomendasi.

"Walaupun persyaratan sudah lengkap, tapi itu (pungli) yang bikin sulit. Jadi untuk membuat KITAP kami harus mengeluarkan puluhan juta," katanya.

Ia juga mengaku sering kali dokumen yang dibawanya ditahan beberapa waktu sehingga menghambat kegiatannya.

Hendratmoko, Kepala Seksi Izin Tinggal Negara Tertentu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengaku, pelanggaran berupa pungli memang kerap terjadi. Ia pun meminta para investor untuk melaporkan pelanggaran tersebut ke nomor hotline Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum.

Hendratmoko menambahkan, sistem imigrasi kini terus melakukan perubahan untuk mencegah pungli, di antaranya dengan sistem online.

"Sebetulnya imigrasi progresnya bagus, dan izin tinggal bisa diurus secara online dan elektronik. Ini bisa menekan oknum mengambil banyak keuntungan, juga memberikan kepastian biaya dan waktu," tuturnya.

--- (Sumber : https://bisnis.tempo.co) ---

Mendag Jelaskan Kebijakan Impor Sapi

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan penjelasan kepada pemerintah Australia terkait dengan adanya perubahan kebijakan importasi sapi di dalam negeri, beberapa waktu lalu.

"Ada pembicaraan bilateral antara Menteri Perdagangan Australia dan kami, khususnya mengenai sapi. Pertama, mereka meminta penjelasan soal rasio 1:5 dan 1:10 yang diterapkan pemerintah Indonesia," kata Enggartiasto, dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, 11 November 2016.

Enggartiasto mengatakan, kebijakan yang barus saja diambil oleh pemerintah Indonesia tersebut, mengacu pada kondisi para peternak dalam negeri untuk mendapatkan pendapatan mencukupi dan juga mengatasi penurunan jumlah populasi sapi di dalam negeri.

"Kami hanya menyatakan bahwa kebijakan yang kami ambil mengacu pada kondisi para peternak tersebut," kata Enggartiasto.

Kementerian Pertanian telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 Tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, yang menjadi payung hukum perubahan skema importasi sapi ke Indonesia.

Menurut Enggartiasto, pemerintah Australia menyatakan bahwa untuk menjalankan industri peternakan sapi tidak mudah dan berbeda dengan industri penggemukan. Namun, pemerintah menyatakan bahwa untuk menyiapkan pelaku usaha dalam negeri tersebut, maka kebijakan itu tidak dilakukan dalam waktu singkat.

"Mereka menyatakan bahwa untuk peternakan itu tidak mudah, dan berbeda dari penggemukan. Saya katakan, saya tahu persis bahwa itu dua hal yang berbeda. Itulah sebabnya kami berikan waktu hingga 2018, sehingga ada persiapan bagi pelaku usaha," tutur Enggartiasto.

Dalam kesempatan tersebut, Enggartiasto menyampaikan kepada pemerintah Australia bahwa harga sapi bakalan dari Negeri Kanguru tersebut, terus mengalami kenaikan atau berada pada kisaran harga yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia pada akhirnya membuka opsi untuk mengimpor dari negara lain.

"Karena itu, kami membuka sumber lain untuk impor, yaitu Meksiko, Spanyol dan Brazil. Brazil yang lokasinya cukup jauh, harganya jauh lebih murah daripada Australia," ucap Enggartiasto.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah Australia menyatakan segera melakukan pembicaraan dengan pelaku usaha, meskipun kebijakan terkait harga bukan pada tangan pemerintah.

"Mereka akan membicarakan untuk efisiensi dalam upaya untuk menurunkan harga. Jika harga dari Australia lebih baik, maka orang tidak akan mau impor dari Brazil. Tapi jika harga tinggi, kami tidak bisa," ujar Enggartiasto.

Belum lama ini, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengubah skema atau bentuk kebijakan importasi sapi bakalan. Selama ini, jumlah sapi bakalan yang masuk ke Indonesia dan dijadikan sumber protein masyarakat tersebut mencapai kurang lebih 600.000 ekor per tahun.

Perubahan skema importasi sapi tersebut dipicu keinginan pemerintah untuk menambah jumlah sapi indukan di dalam negeri. Dengan pertimbangan untuk menambah jumlah produksi sapi di Indonesia, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan sepakat untuk mewajibkan importir sapi bakalan mengimpor sapi indukan.

Impor sapi indukan tersebut menggunakan rasio 1:5 bagi pelaku usaha, sementara untuk Koperasi Peternak dan Kelompok Peternak dengan rasio 1:10. Pemenuhan rasio tersebut nantinya dilakukan bertahap dan akan diaudit pada 31 Desember 2018.

Pada skema impor dengan rasio 1:5 tersebut, setiap pelaku usaha yang mengimpor lima ekor sapi, maka sebanyak empat ekor merupakan sapi bakalan dan satu ekor sapi indukan. Untuk rasio 1:10, maka wajib mengimpor satu indukan dan sisanya berupa sapi bakalan

--- (Sumber : https://bisnis.tempo.co)---

BPS : Oktober 2016, Nilai Ekspor dan Impor Indonesia Naik

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan nilai ekspor sebesar 0,88 persen pada Oktober 2016 (mom), atau meningkat 4,60 persen dibandingkan dengan Oktober 2015. Kepala BPS Suhariyanto mengatakan nilai ekspor Oktober sebesar US$ 12,67 miliar. Jumlahnya meningkat dari realisasi September sebesar US$ 12,56 miliar.

"Peningkatan ekspor disebabkan oleh kenaikan ekspor non migas," kata Suhariyanto di kantor BPS, Selasa, 15 November 2016. Ekspor non-migas pada Oktober tercatat sebesar US$ 11,64 miliar. Nilainya naik 1,22 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar US$ 11,50 miliar.

Sementara ekspor migas Oktober tercatat turun 2,85 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Nilai ekspor migas pada Oktober sebesar US$ 1,03 miliar sementara September sebesar US$ 1,06 miliar.

Suhariyanto mengatakan penurunan ekspor migas disebabkan oleh menurunnya ekspor hasil minyak dan minyak mentah. Ekspor hasil minyak turun sebesar 34,31 persen menjadi US$ 51,9 juta sedangkan ekspor minyak mentah turun 27,70 persen menjadi US$ 309,5 juta. Sementara itu, ekspor gas tercatat naik 20,82 persen menjadi US$ 669,9 juta.

Volume ekspor migas Oktober terhadap September 2016 untuk minyak mentah turun 31,31 persen. Sementara hasil minyak turun 41,60 persen dan gas naik 2,72 persen. Harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia naik dari US$ 42,17 per barel pada September menjadi US$ 46,64 per barel pada Oktober.

Suhariyanto mengatakan, secara kumulatif, nilai ekspor pada periode Januari-Oktober 2016 mencapai US$ 117,09 miliar. Nilainya turun 8,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara ekspor kumulatif non migas mencapai US$ 106,36 miliar atau turun 4,65 persen.

Sementara impor pada Oktober 2016 tercatat mencapai US$11,47 miliar. Nilainya naik 1,55 persen atau US$ 174,7 dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dibandingkan Oktober tahun lalu, jumlahnya naik 3,27 persen.

Suhariyanto mengatakan peningkatan terjadi pada impor non migas sebesar US$ 406,6 juta atau 4,27 persen. Sementara impor migas turun US$ 231,9 juta atau 13,13 persen.

Penurunan impor migas dipicu oleh turunnya nilai impor seluruh komponen migas. Minyak mentah turun 18,58 persen atau US$ 116,5 juta; hasil minyak 11,25 persen atau US$ 112,6 juta; dan gas 2,02 persen atau US$ 2,8 juta.

Secara kumulatif, nilai impor Januari hingga Oktober 2016 mencapai US$ 110,16 miliar. Jumlahnya turun US$ 8,9 miliar atau 8,61 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan terjadi pada impor gas dan non migas masing-masing sebesar US$ 5,8 miliar atau 27,73 persen dan US$ 3,06 miliar atau 3,12 persen.

Penurunan impor migas disebabkan oleh turunnya nilai impor minyak mentah sebesar US$ 1,20 miliar atau 17,59 persen. Hasil minyak pun turun US$ 4,3 miliar atau 34,06 persen dan gas turun US$ 349,6 juta atau 21,02 persen.

--- (Sumber : https://bisnis.tempo.co) ---

Pemerintah imPor Cangkul, Pande Besi Terancam GulunG Tikar

Impor cangkul yang dilakukan pemerintah, secara tidak langsung membuat pande (perajin) besi di Gunungkidul resah karena terancam gulung tikar. Sebab hasil karya mereka kalah bersaing dengan buatan luar negeri.

Berkaitan dengan itu, perajin besi di Kabupaten Gunungkidul mengaku kecewa dengan penerapan impor cangkul dari Tiongkok dan Vietnam yang dilakukan pemerintah. Kebijakan import yang sudah lama dilakukan ini, menyebabkan perajin tidak memproduksi cangkul.

”Jujur saja sejak cangkul impor masuk ke tanah air, produk kami turun drastis,” kata Siswanto Anwar, perajin besi asal Desa Karangtengah, Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, Senin (7/11).

”Yang jelas sejak pacul impor itu masuk ke Indonesia, omzet kami mengalami penurunan yang cukup drastis,” tambah dia.

Menurut Siswanto Anwar, sejak masuk cangkul impor beberapa tahun terakhir ini menyebabkan para perajin mengalami penurunan omzet yang cukup signifikan. Diakuinya harga cangkul impor lebih murah dibandingkan hasil karyanya. ”Segi kwalitas sebenarnya tidak kalah, tetapi karena omset terus menurun kami tidak lagi memproduksi cangkul,” katanya.

Untuk mengantisipasi supaya tetap produksi, pihaknya saat ini lebih fokus memproduksi Sabit, Parang dan juga perkakas pertanian lainnya yang lebih laku dipasaran. ”Saat ini fokus memproduksi yang jelas laku saja, semoga pemerintah tidak mengimpor Sabit,” katanya berharap.

Ia berharap agar kebijakan impor Cangkul yang dilakukan pemerintah di kaji ulang, agar para pengrajin kelas menengah/kebawah tidak dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut. Apalagi, selama ini pemerintah selalu mengkampanyekan penggunaan barang produksi lokal untuk menghidupkan kembali industri kerajinan lokal.

Sementara salah Warsito, salah seorang petani warga Playen, Suwito mengaku memilih membeli produk China yang dijual di toko bangunan dengan harga Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu. ”Cangkul dari China lebih awet, ini saya pakai sejak 2 tahun lalu kondisinya masih bagus,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Poniran, warga Desa Patuk. ”Jujur saja harganya lebih murah, sehingga kami memilih beli Cangkul impor. Selain murah, tapi juga kuat dan tahan lama,” katanya menjelaskan.

Pemerintah Tegaskan Cangkul Impor Sedikit

Pemerintah menegaskan bahwa jumlah cangkul impor yang digunakan di dalam negeri sangat kecil atau tidak signifikan dibandingkan kebutuhan cangkul nasional.

"Kebutuhan cangkul nasional rata-rata sebesar 10 juta unit per tahun, sementara importasinya sebesar 86.160 unit," kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Dody Edward di Jakarta, Senin, 31 Oktober 2016.

Dody mengakui bahwa Kemendag memberikan izin kepada PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) untuk mengimpor

kepala cangkul pada Juni 2016 dan izin tersebut berakhir pada Desember 2016.

Menurut Dody, dari total izin impor kepala cangkul yang berikan, yakni sebesar 1,5 juta unit, realisasi impornya hanya sebesar 5,7 persen atau 86.190 unit.

"Jadi, mengapa masih impor, memang karena masih dibutuhkan. Impornya juga bukan dalam bentuk utuh, hanya kepala cangkulnya saja. Jadi, masih perlu disempurnakan di dalam negeri," ungkap Dody.

Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawirawan menyampaikan, kebutuhan cangkul nasional sebagian besar dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.

Menurutnya, industri besar di dalam negeri mampu memproduksi 700 ribu cangkul per tahun, sementara terdapat 2.000 Industri Kecil Menengah (IKM) yang turut memproduksi cangkul dan tersebar di 12 sentra industri.

"Koordinasi dengan Kemendag sangat erat. Ada proses 6 bulan untuk menghitung dan memberikan izin impor. Itu dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kemenperin dengan waktu dan jumlah yang ditentukan," papar Putu.

Kepala Badan Penelitian dan Pengkajian Industri Haris Munandar menambahkan, industri dalam negeri saat ini mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan cangkul nasional yang telah memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

"SNI cangkul memang masih bersifat sukarela. Kita sudah punya standar mutu yang dilakukan produsen cangkul di dalam negeri," pungkasnya.

Petani Sulawesi Selatan Tolak Cangkul Impor

Program impor cangkul yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mendapat respons dari petani di Sulawesi Selatan. Ketua Kerukunan Tani dan Nelayan Andalan Sulawesi Selatan Muhammad Yunus menyayangkan program impor cangkul. "Ini sama saja dengan tidak mempercayai keahlian pandai besi kita," kata Yunus kepada *Tempo*, Senin, 31 Oktober 2016.

Menurut Yunus, rata-rata pandai besi juga berprofesi sebagai petani. Dengan impor cangkul, pendapatan sampingan mereka praktis terganggu.

Menurut Yunus, seharusnya pemerintah fokus menggenjot dan membantu warga yang punya keahlian khusus membuat cangkul. Dengan impor dari luar negeri, sama saja pemerintah tidak ingin melihat petani berkembang.

Yunus menambahkan, banyak hal yang sepatutnya menjadi perhatian pemerintah selain mengurus soal cangkul. Dia mencontohkan, persoalan bibit, pupuk, dan harga produk pangan yang kerap dirasakan petani. "Ini yang seharusnya menjadi perhatian karena lebih berdampak pada petani," katanya.

Sebelumnya, dikabarkan pemerintah melalui PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) mengimpor cangkul dari Cina. Cangkul impor ini masuk melalui Medan pada Agustus lalu. Tahap perdana, PT PPI mengimpor satu kontainer dengan perincian 900 boks, masing-masing boks berisi 24 cangkul. PT PPI akan meningkatkan kuantitas impor yang selanjutnya.

Sekretaris Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sulawesi Selatan, Judy Rahardjo, menilai kebijakan pemerintah sangat tidak populer. Impor cangkul itu secara langsung akan berdampak kepada industri kecil dalam negeri.

Judy menyatakan cangkul menjadi alat strategis bagi petani saat ini. "Yang terpukul adalah industri kecil. Mengapa bukan itu saja yang digenjot."

--- (Sumber : http://berita.suaramerdeka.com dan https://bisnis.tempo.co) ---

Trade Expo Indonesia Dibuka Jokowi, Targetkan Rp2 Triliun

Presiden Joko Widodo Buka Trade Expo 2016

Sebanyak 1.100 perusahaan nasional akan menjadi bagian dari pameran berkelas internasional, Trade Expo Indonesia (TEI) 2016, yang diprakarsai oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Acara yang bertempat di JIExpo Kemayoran Jakarta itu akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo, hari ini Rabu 12 Oktober 2016 pukul 10.00 WIB.

Kemendag menargetkan 14.700 buyer dari 119 negara. Adapun produk unggulan ekspor dari 1.100 perusahaan ini dipamerkan di area seluas 50 ribu meter persegi, yang terbagi dalam enam zonasi, yaitu manufaktur, furnitur dan dekorasi rumah.

Kemudian, produk makanan, minuman, perikanan dan pertanian. Kemudian kerajinan premium, kecantikan, dan gaya hidup. Ada pula industri kreatif, serta jasa dan investasi.

Menurut pantauan VIVA.co.id, keramaian sudah mulai terlihat dari pengunjung baik domestik maupun internasional, serta terlihat juga para petugas keamanan.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita sehari sebelum acara ini dimulai mengungkapkan dari TEI ini bertujuan untuk mendongkrak ekspor produk dalam negeri. "Kita targetkan (transaksi ekspor) Rp2 triliun, di tempat ini saja," ujar Enggar.

Kemendag saat ini menerapkan strategi diversifikasi pasar tujuan ekspor. Buyers dari pasar non tradisional yang akan mendominasi arena TEI adalah dari Afrika dan Timur Tengah.

Tidak hanya itu, Enggar mengaku juga sedang mempertimbangkan akan menggelar acara serupa di daerah lain di Indonesia karena menurutnya masih banyak potensi daerah yang bisa jadi unggulan.

"Tak menutup kemungkinan juga akan digelar di daerah lain, karena mereka punya ragam produk unggulan yang layak kita promosikan di pasar internasional," katanya.

Singapura Cetak Transaksi Rp31,2 Miliar

Transaksi tahun ini meningkat tajam jika dibanding dengan 2015. Para pengusaha Singapura membukukan transaksi dagang senilai US$2,4 juta atau Rp31,2 miliar (kurs Rp13.000) pada hari pertama Trade Expo Indonesia (TEI) yang digelar mulai Rabu 12 Oktober 2016. TEI berlangsung hingga Minggu 16 Oktober 2016.

Pada hari pertama TEI, perusahaan asal Singapura, Scanteak Singapore menandatangani nota kesepahaman untuk komitmen pembelian dengan dua perusahaan furnitur asal Jawa Tengah, PT Jawi Antik Indonesia dan CV Roda Jati. Diharapkan beberapa transaksi dagang akan turut dilakukan oleh peserta Singapura hingga hari terakhir TEI.

"Transaksi sebesar US$2,4 juta di hari pertama merupakan peningkatan yang cukup tajam dibandingkan US$150 ribu (Rp1,95 miliar) pada TEI tahun 2015," demikian pernyataan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura, seperti dikutip dari siaran persnya, Kamis 13 Oktober 2016.

KBRI Singapura membawa 63 pelaku usaha asal Singapura yang bergerak di bidang makanan dan minuman, tekstil dan garmen, furnitur, rempah-rempah, manufaktur dan beberapa produk lainnya untuk menghadiri TEI. Kehadiran 63 pelaku usaha diharapkan mampu menggenjot ekspor produk-produk Indonesia ke Singapura, yang merupakan komitmen utama Duta Besar RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya, sebagai bagian dari diplomasi ekonomi RI, sekaligus memanfaatkan pasar ASEAN melalui Singapura.

Ngurah dan jajaran staf KBRI menyampaikan komitmen untuk terus memfasilitasi para importir guna meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Beberapa importir bahkan merupakan perusahaan yang mendatangkan sekitar 90 persen dari total produk impor asal Indonesia selama lebih dari satu dekade.

Dalam kesempatan menghadiri TEI, Ngurah juga melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roslani, untuk terus mengupayakan peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Singapura, khususnya dalam bidang perdagangan, investasi dan pariwisata. KBRI juga menyelenggarakan jamuan makan malam bersama untuk memfasilitasi para pelaku usaha.

TEI 2016 Sumbang Penerimaan Rp7,82 Triliun

Pemerintah akan sasar produk furniture dan kerajinan rotan. Kementerian Perdagangan (Kemendag) pada pembukaan Trade Expo Indonesia (TEI) tahun ini, Rabu kemarin, 12 Oktober 2016, menyatakan sedang mengupayakan diversifikasi produk dan pasar ekspor baru untuk meningkatkan nilai perdagangan Indonesia.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan P. Roslani menilai, upaya tersebut dapat menyumbang pendapatan negara sekitar US$600 juta, atau setara Rp7,82 triliun (kurs Rp13.040 per dolar Amerika Serikat).

"Tadi ngobrol sama Menteri Perdagangan, ini bisa memberi pendapatan negara kurang lebih US$600 juta," ungkapnya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Jumat, 14 Oktober 2016.

Sedangkan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengatakan, untuk komoditas produk yang sementara ini menjadi perhatian baru dari pemerintah adalah furniture, dan kerajinan rotan. Dua produk ini, dikatakannya, ternyata memiliki tanggapan baik dari pasar asing.

Adapun pasar baru tersebut, Enggar menyatakan, akan menyasar pasar-pasar ekspor baru sesuai arahan presiden, yaitu Afrika, Iran, India, Banglades, dan Amerika Latin. Sedangkan untuk produk, tentunya akan disesuaikan dengan selera masing-masing negara.

Sebagai gambaran bahwa satu kursi kerajinan (furniture) dapat dijual dengan harga 1.400 euro, atau setara Rp20,2 juta (kurs Rp14.405 per euro).

Selain itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan, produk potensial lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia ke pasar-pasar ekspor non tradisional adalah produk pulp (bubur kertas) dan kertas.

"Selain furniture bisa masuk sekarang pulp dan paper (kertas) ke Amerika Latin. Mereka (Amerika Latin) kan punya potensi ekonomi, karena mereka punya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang kuat, jadi daya beli kuat," ujar dia.

--- (Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id) ---

Blusukan di Mal, Sri Mulyani Dicurhati Soal Tarif Cukai

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat dicurhati pemiliki toko di Pasific Place

Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini melalukan blusukan ke Mal Pasific Place di kawasan SCBD Sudirman Jakarta Selatan. Kunjungannya kali ini ingin mengamati bagaimana aktivitas ekonomi ritel dijalankan oleh kelas menengah atas.

Dalam kunjungannya di salah satu outlet *brand* (toko) ternama itu, Sri Mulyani mendapati beberapa keluhan terkait bea cukai oleh para pelaku ritel. Blusukan Menteri Keuangan wanita pertama RI ini diikuti sejumlah pejabat eselon I di Kementerian Keuangan dan sejumlah pengusaha.

Menteri yang yang akrab disapa Ani itu menyampaikan, birokrasi bea masuk menjadi hambatan bisnis terutama untuk barang impor. Namun, Ani berjanji akan membicarakannya dengan pihak pajak untuk memudahkan bisnis usaha barang Impor.

"Kami dengar apa-apa yang menjadi masukan dari sisi mereka pengadaan barang terutama barang impor yang mewah itu seperti apa. Pasar ada di Indonesia kelompok *high end* yang mencari barang-barang impor," ujar Ani, di Mal Pasific Place, Jakarta, Rabu 2 November 2016.

Ani memahami kebutuhan masyarakat yang sangat berminat membeli barang-barang branded dari luar negeri. Dengan kemudahan dari sisi bea cukai, diharapkan masyarakat lebih suka membeli barang di mal Indonesia dari pada pergi ke mal di Singapura.

"Banyak kalau dari temen-temen kayaknya tarif ya. banyak pungutannya dan levelnya. Ada tadi berapa, di holding masalah pajak impor dan lain-lain, yang kedua juga keluhan soal bahwa Indonesia banyak sekali barang yang dianggap tidak masuk secara formal terutama yang branded," tuturnya.

Dengan mudahnya bisnis yang banyak dinikmati oleh masyarakat, diharapkan dapat mendongkrak perekonomian. Sebab, kata Ani, ekonomi didorong bukan hanya dari sisi konsumsi dan saja.

--- (Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id) ---

Sri Mulyani Sebut Indonesia Dilebeli Pasar Barang Bekas

Industri diminta buat produk yang bisa saingi harga barang bekas Barang bekas, khususnya pakaian, sampai sekarang masih marak beredar di Indonesia. Barang ini telah memiliki pangsa pasarnya sendiri, karena selain murah, terkadang kita bisa mendapatkan barang yang bermerek di tengah tumpukan barang bekas tersebut. .

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di hadapan para pengusaha dalam acara temu usaha, pameran dan fashion show industri aneka, kulit, alas kaki, atau sepatu dan fesyen di Kementerian Perindustrian, Selasa 1 November 2016, mengaku kesal dengan maraknya peredaran pakaian bekas itu.

"Pakai bekas makin banyak beredar. Kita masih dilabeli sebagai pasar penerima pakaian bekas," kata Ani, sapaan akrab Sri Mulyani.

Dia mengaskan, pemerintah tidak ingin labeling itu terus melekat kepada Indonesiam dan pihaknya berkomitmen untuk mencari cara untuk menghentikannya. "Harus mengidentifikasi pelaku impornya dulu. Kita harus tindak lanjuti. Pasarnya, ini masih sangat besar," ungkapnya.

Dia pun meminta kepada para pengusaha untuk turut memberikan perhatian. Dengan memberikan produksi lebih terjangkau untuk dapat diterima masyarakat semua kalangan, khususnya daerah perbatasan yang sering kali menjadi pasar barang penyelundupan yang harganya lebih murah.

Menurutnya, perhatian pemerintah saja tidak cukup, jika tidak dibarengi dengan kontribusi para pengusaha yang peduli dengan nasib bangsa. Pemerintah berjanji akan mempermudah regulasi terkait penyediaan bahan baku.

"Jika persoalannya adalah pengusaha tidak dapat memberikan harga lebih terjangkau, karena perizinan pengadaan bahan baku produksi berbelit, kami (pemerintah) akan kaji untuk deregulasi," ungkapnya.

Sebab, baginya kepentingan baik pengusaha dan konsumen (masyarakat umum) sama-sama penting. "Dua-duanya penting buat kami. Kami perlu menimbang dari sisi konsumen dan produsen untuk menciptakan aturan," tegasnya.

--- (Sumber : http://bisnis.news.viva.co.id)---

Ironi RI: Negeri Kaya Jeruk, Tapi Jeruknya Banyak yang Impor

Punya kekayaan verietas buah tropis yang luar biasa banyaknya, bukan jaminan Indonesia jadi negara pengekspor buah besar. Volume ekspor bahkan terbilang kecil jika dibandingkan dengan buah impor yang membanjiri pasar dalam negeri.

Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo), Khafid Sirotudin mengatakan, banyak sekali buah tropis yang sebenarnya bisa diproduksi di dalam negeri, namun malah bergantung pada buah impor, jeruk salah satu contohnya.

"Negara ini kaya varietas buah, kaya saja, tapi barangnya sedikit. Contohnya jeruk saja lah. Enak jeruk kita, banyak pula yang enak daripada impor, ada Jeruk Medan, Jeruk Pontianak, Jeruk Kintamani, Jeruk Probolinggo, dan masih banyak lagi. Lebih banyak malahan Jeruk Mandarin," ucap Khafid kepada detikFinance, Minggu (20/11/2016).

"Masalahnya jeruknya ada apa nggak? Karena nggak diperhatikan. Orang malas tanam karena harga jatuh karena impor. Petani itu nggak mau tanam sesuatu yang nggak menghasilkan uang. Saya datang ke sentra jeruk, pas panen banyak, begitu besoknya sudah nggak ada. Karena nggak diatur sama pemerintah, dibiarkan saja," kata dia lagi.

Jika pemerintah serius menggarap buah sebagai komoditas penting, seharusnya pemerintah bisa membuat aturan jelas terkait impor buah yang bisa masuk ke Indonesia.

"Kalau mau diperjelas aturannya, silakan saja dibebaskan masuk buah subtropis. Tapi untuk buah tropis seperti jeruk nggak perlu impor, toh bisa diproduksi banyak sama lokal. Kalau China saja bisa larang manggis dan salak masuk ke negaranya, kenapa kita tidak. Apa yang ditakutkan," ujar Khafid.

Apalagi, menurutnya, konsumsi buah per kapita Indonesia masih rendah yakni 35 kilogram per orang per tahun. Ketergantungan impor akan semakin besar jika buah lokal terus dianaktirikan dibandingkan komoditas lain seperti kelapa sawit atau pangan pokok.

"Kalau sekarang saja per kapita 35 kilogram itu dicukupi dari impor, bagaimana kalau sudah naik jadi 50 kilogram per kapita, dikalikan 250 juta penduduk, bayangkan berapa besar impor buahnya. Jadi nggak perlu cari ekspor, fokus dulu saja bagaimana kembangkan buah untuk substitusi impor," tandas Khafid

Nilai Rasio Ekspor Impor Pertanian Indonesia

Neraca perdagangan komoditas hortikultura Indonesia masih belum memuaskan, karena nilai impor lebih besar dibandingkan dengan nilai ekspor. Pada tahun fiskal 1996 hingga tahun 2001, secara keseluruhan nilai impor masih lebih besar dari ekspor.

Rasio antara nilai ekspor dengan nilai impor untuk periode tersebut rata-rata adalah sebesar 1,09, yang berarti hampir seimbang atau mencapai titik impas. Namun demikian, nilai rasio dari tahun ke tahun sangat variatif. Pada tahun 1996 nilainya sebesar 0,96 namun tahun 1997 turun menjadi 0,52.

Neraca perdagangan yang menguntungkan hanya terjadi pada tahun 1999 yang menghasilkan nilai EM rasio sebesar 2.40. Selanjutnya apabila kitamelihat lebih dalam. yaitu mengenai jenis komoditas ekspor dan impor, ternyata nilai EI rasio dari buah segar beku dan sayuran segar/beku mempunyai nilai yang rendah sekali masing-masing sebesar 0,20 dan 0,27.

Dapat disimpulkan bahwa secara parsial, komoditas hortikultura merupakan komoditas ekspor yang menguntungkan dalam arti mampu mendatangkan devisa negara yang tinggi. Komoditas yang paling menguntungkan antara lain dalam bentuk buah (nilainya 23 kali lebuh besar dari impor), disusul oleh tanaman hias Munga (sebesar SAS kali nilai impor), ayuran kering/olahan 3 kali nilai impor dan aneka tanaman hanya 1,81 kali nilai impor. Namun demikian terlihat jelas bahwa nilai rasio tersebut bervariasi dari tahun ke tahun dengan selisih yang cukup tajam.

Hal ini menunjukkan tingkat teknologi yang belum mapan sepenuhnya sehingga menyebabkan nilai ekspor dan kontinuitas yang tidak stabil. Hal yang perlu diperhatikan dalam kondisi nilai tukar tersebut adalah bagaimana mempertahankan sekaligus menstabilkan kuota ekspor dan meningkatkan teknologi budidaya dan pasca panen Dalam dunia perdagangan, kontinuitas atau rutinitas pasok merupakan syarat utama sehingga tidak memberi kesempatan negara pengekspor lain untuk merebut pangsa pasar yang sudah pasti Permintaan pasar untuk buah tropis dari negara-negara Eropa sangat tinggi.

Untuk itu peluang ini perlu dimanfaatkan. Ekspor komoditas bebuahan dalam bentuk segar mungkin sulit dilakukan, karena pada umumnya produk bebuahan tidak tahan lama yerishalle). Sementara belum diketahui teknis yang bisa menjamin ekspor berbentuk buah segar, maka ekspor berbentuk buah awetan atau olahan dari beku merupakan pilihan yang terbaik seperti terlihat pada Tabel 29, hal tersebut mendatangkan keuntungan yang baryak Hubungan dagang dengan negara Belanda perlu ditingkatkan kembali sebagai pintu gerbang ekspor ke negara-negara Eropa lainnya.

Nilai rasio yang masih sangat rendah adalah dari komoditas produk buah segar/beku dan sayuran beku yang hanya bernilai antara 2002 ? lai berarti bahwa ekspor kita hanya sekitar 20 tidak seimbang bila dibandingkan dengan nilai impor Hal ini juga berarti bahwa devisa negara kita yang terus mengalir keluar negeri taia rata dari tahun 19% hingga 2001 adalah sekitar (Rp. 50 trilliun / tahun). Di masa yang akan datang nilai buah impor ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Hal ini disebabkan karena konsumen buah impor sebagian besar adalah berasal dari golongan masyarakat menengah ke atas yang mendambakan buah berkualitas balk dan nereka mempunyai kemampuan untuk membayar mahal. Sebaliknya masyarakat dari kalangan bawah lebih banyak mengkonsumsi buah mengingat harganya lebih murah.

Namun demikian, kondisi ini masih harus tetap diwaspadai karena bisa saja nanti sesudah pemberlakuan tarif nol, harga buah impor akan terjangkau oleh masyarakat bawah. Dapat dilihat perbandingan antara nilai buah ekspor dan buah impor mulai tahun 1996 hingga 2001.

Produk olahan buah juga merupakan penyumbang devisa negara yang sangat bernilai yaitu sekitar 23 kali. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa industri pengolahan buah harus ditingkatkan karena jenis komoditas olahan meningkatkan sumber devisa Ini berarti produk buah segar, sebagai bahan baku produk olahan, masih memegang peran penting Dengan kata lain, perlu diseminasi teknologi budidaya agar produksi buah nasional semakin meningkat.

Produk buah segar ditingkatkan guna menekan impor, disamping sebagai bahan baku buah olahan.

Untuk meningkatkan citra komoditas buah segar perlu ddakukan program pengembangan terpadu. Program tersebut dapat dimulai dari seleksi pohon induk yang produktif pada waktu musim bebuahan, perbanyakan tanaman pohon terpilih secara besar- besaran, perawatan tanaman serta perbaikan pasca panen.

Di setiap sentra produksi bebuahan harus didirikan pabrik pengolahan produk, baik untuk kalengan maupun dalam bentuk beku Rendahnya produktivitas buah juga bisa disebabkan karena faktor genetis, yaitu inkompatibilitas selain perawatan (agronomi) yang rutin (Ashari, Nilai rasio ekspor impor buah olahan/kering perlu dipertahankan dengan mempertahankan kuota ekspor dan ketepatan waktu pasok.

Namun semuanya itu harus didukung oleh tersedianya bahan baku yang kuat Untuk itu, pembukaan perkebunan bebuahan baru harus dirintis di setiap lokasi sesuai dengan habitatnya masing-masing Program ini perlu dilaksanakan dalam upaya menjaga pasok bebuahan agar bisa rutin, cukup dan stabil setiap musim setiap tahun.

Produktivitas tanaman belualan kita masih belum bisa memenuhi kebutuhan gizi sebagian besar masyarakat Kebutuhan untuk konsumsi bebuahan sebagaimana yang disarankan oleh FAO adalah 64 kg/kapita/tahun.

Konsumsi bebuahan rata-rata 20 penduduk Indonentia baru mencapai 35 kg/kapital/tahun (64%).

Sementara itu konsumsi buah oleh penduduk Thailand sekitar 70 kg/kapita/tahun, bahkan konsumsi bebuahan oleh penduduk Jepang sudah melampaui standar FAO, yaitu 95 kg kapita/tahun atau sekitar 13% Untuk tercukupi kebutuhan betuahan bagi masyarakat, pemerintah harus mengimpornya dari luar negeri. Cukup banyak devisa negara yang dikeluarkan untuk mengimpor bebuahan ini.

Bahkan, rata-rata nilai impor per tahun mulai tahun 1996 hingga tahun 2001 sebesar 2,3 kali nilai ekspor. Naman, ekspor buah olahan kering memerlukan angka yang menggembirakan, yeitu sekitar 23 kali nilai impor buah berarti bahwa produk buah segar untuk bahan baku produk olahan masih memegang kundi penting Nilai rasio ekspor impor buah di alahan kering perlu dipertahankan dengan mempertahankan kuota ekspor ketepatan waktu.

--- (Sumber : http://finance.detik.com dan http://www.agrotani.com)---

Indonesia Akan Bentuk Komite Nasional Fasilitas Perdagangan

Pemerintah Indonesia akan membentuk Komite Nasional Fasilitas Perdagangan (KNFT) atau National Trade Facilitation Committee (NTFC). KNFP adalah lembaga yang bersifat kementerian/lembaga pemerintah dan lintas pemangku kepentingan terkait guna mengidentifkasi, merumuskan serta melaksanakan kebijakan fasilitas perdagangan yang lebih efisien. Keberadaan lembaga ini dinilai mendesak, karena indikator kinerja fasilitas perdagangan Indonesia yang relative rendah dibandingkan dengan negara-negara anggota WTO lainnya, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iman Pambagyo mengemukakan hal tersebut dalam temu konsultasi publik dalam rangka pemahaman implementasi ketentuan perjanjian perdagangan (WTO-TFA), baru-baru ini.

Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iman Pambagyo

Data yang disajikan Dirjen dalam temu konsultasi tersebut menyebutkan peringkat Indonesia tahun 2016 mengenai Logistic Performance Indeks (LPI) menduduki urutan 63 dari 160 negara. Ease of Doing Business peringkat 108 dari 189 negara, Ease of Trading Across Border peringkat 105 dari 189 negara (2015) dan Global Competitiveness Indeks peringkat 37 dari 140 negara. KNFP atau NCTF merupakan mandat dari artikel 23.3 perjanjian fasilitas perdagangan. “Setiap anggota wajib mendirikan atau mempertahankan sebuah KNFP atau menunjuk mekanisme yang ada untuk memfasilitasi baik koordinasi di dalam negeri dan pelaksanaan ketentuan perjanjian ini.”

WTO (World Trade Organization) tidak memberikan ketentuan khusus terkait dengan NCTF dan memberikan kebebasan bagi setiap anggota untuk menginterprestasikan struktur, sifat, dan susunan terkait dengan NCTF. Tugas NCTF adalah melakukan koordinasi di dalam negeri untuk menyatukan kesamaan persepsi dan koordinasi yang efektif antar institusi terkait sehingga terjadi sinergi antara kebijakan dan praktik pengelolaan di pintu masuk (borders) arus barang. Koordinasi tersebut akan memastikan bahwa dalam hal pengelolaan di pintu masuk, instansi terkait membahas usulan satu sama lain, sehingga duplikasi atau prosedur yang tidak perlu dapat dihindari serta proses borders menjadi lebih efisien, misalnya melalui kegiatan data sharing dan inspeksi bersama.

Peran Kunci

Sekjen GINSI (Gbungan Importir Nasional Seluruh Indonesia), Achmad Ridwan, ketika dihubungi secara terpisah mengharapkan pembentukan KNFT segera dilakukan pemerintah. Karena menurut Ridwan, dengan mengutip data Kemendag dalam temu konsultasi tanggal 26 Agustus 2016 bahwa NCTF ternyata memainkan peran kunci dalam melaksanakan ketentuan perjanjan failitas perdagangan yang memerlukan koordinasi yang efektif antar lembaga dan publik-swasta. NCFT diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan perjanjian fasilitas perdagangan untuk mencegah perselisihan (dispute) atau kosekuensi negative yang mungkin terjadi dimasa depan dengan anggota WTO lainnya. NCFT juga akan membawa hubungan yang lebih sinergis antar pemerintah dan pelaku usaha dalam membahas dan menerapkan langkah-langkah fasilitas perdagangan.

Tujuan utama NCTF berperan sebagai forum terbuka guna mempromosikan fasilitas perdagangan, memfasilitasi koordinasi antar-lembaga dan memberikan arahan dalam menangani isu terkait fasilitas perdagangan. Secara spesifik NCTF menyediakan forum nasional yang dilengkapi dengan mekanisme konsultasi untuk membahas prosedur dan formalitas yang digunakan dalam perdagangan internasional (facilitation objectives).

Menyusun rekomendasi kebijakan terkait investasi perdagangan dimasa depan (development objectives). Meningkatkan kesadaran (awareness) atas menafaat yang diperoleh dari fasilitas perdagangan (autreash and capacity building). Mendukung negosiasi fasilitas perdagangan di tingkat bilateral, regional maupun multilateral (negotiations objectives).

Manfaat pembentukan NCFT di Indonesia, menurut Sekjen, pihak pemerintah dan swasta berada dalam platform yang sama sehingga masing-masing pihak dapat saling memahami harapan dan hambatan yang dihadapi sekaligus mencari solusi atas masalah yang masih ada. Memudahkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan terkait fasilitas perdagangan. Memudahkan pemerintah dalam mengatasi hal-hal yang perlu disiapkan untuk menghadapi implementasi WTO-TFA. Membantu mendorong setiap Kementerian/Lembaga untuk dapat meningkatkan kesiapannya dan posisinya terhadap kategorisasi implementasi WTO-TFA. Memberikan kemudahan bagi pemerintah untuk mengkoordinasikan persiapan implementasi WTO-TFA sehingga dapat berjalan harmonis dan efektif.

Isu-isu yang muncul dalam pembentukan adalah keterlibatan (private sector), anggaran, struktur kelembagaan, koordinator dan Adhok atau permanen. Kementerian Nasional dalam rangka pembentukan NCFT. Kementerian/Lembaga Pemerintah dan pihak swasta yang terkait diharapkan dapat menjadi anggota NCFT. Perbandingan keanggotaan NCFT di sejumlah negara dan usulan bagi keanggotaan NCFT di Indonesia.

--- (Sumber : Warta Ginsi Edisi Oktober 2016 Nomor 3470/V) ---

Sistem Klasifikasi dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Barang Impor

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan perubahan kelima atas peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No.213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Perubahan itu sendiri terdapat pada pasal II Permenkeu No.134/PMK.010/2016 tanggal 13 September 2016, dimana disebutkan bahwa tarif bea masuk untuk barang impor dimaksudkan dalam kolom 5 lampiran II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Kemudian, kolom 6 lampiran II mulai berlaku terhitung 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Kolom 7 lampiran II mulai terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Kolom 8 lampiran II mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 dan seterusnya.

Tarif bea masuk untuk barang impor yang tercantum dalam lampiran II sesuai dengan tarif bea masuk sebagaimana tercantum dalam Permenkeu No.213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebasan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No.35/PMK.010/2016 tentang Perubahan Keempat atas Permenkeu No.213/PMK.010/2011 dengan tarif bea masuk paling tinggi sebesar 5%.

Setelah PIB dapat nomor

Pengenaan tarif bea masuk berlaku atas impor barang yang dokumen pemberitahuan pabean impor barang (PIB) telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean Pemasukan terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan menteri ini, setelah 10 hari terhitung sejak tanggal dundangkannya pada tanggal 14 September 2016.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, perubahan pengenaan tarif ini sebagai tindak lanjut atas kesepakatan para pemimpin APEC pada tahun 2012 di kota Vladiovostok, Rusia, telah mendeklarasikan untuk menyepakati APEC List of Environmental Goods yang tarif bea masuknya menjadi 5% atau kurang dari 5%. Karena secara langsung berkontribusi positif terhadap tujuan pembangunan ramah lingkungan (grenn growth) dan pembangunan berkesinambungan.

Penurunan tarif bea masuk, kata Menkeu, sangat memperhatikan keadaan ekonomi anggota APEC dan dengan mengabaikan posisi anggota dimaksud di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan para pemimpin APEC, Menteri Keuangan untuk melakukan penyelarasan Permenkeu No.213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor yang beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu No.35/PMK.010/2016

--- (Sumber : Warta Ginsi Edisi Oktober 2016 Nomor 3470/V) ---

Deklarasi Inisiatif Pabean

Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Kuangan (Permenkeu) No.67/PMK.04/2016 tanggal 27 April 2016 tentang Deklarasi Inisiatif Pabean. Direktur Kepabeanan Internasional, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, Robert Leonard Marbun mengatakan, kebijakan deklarasi inisiatif tersebut merupakan bentuk manifestasi fungsi trade facilitator DJBC (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai). Kebijakan ini juga sekaligus untuk mendukung kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah di bidang kepabeanan.

Direktur Kepabeanan Internasional, Ditjen Bea dan Cukai, Kemenkeu, Robert Leonard Marbun

Deklarasi inisiatif, juga dilaksanakan dalam upaya mengakomodasi praktik-praktik bisnis internasioanl,dimana sejumlah komponen pembentuk harga barang untuk perhitungan bea masuknya belum dapat diketahui besaran nilainya secara pasti pada saat penyampaian dokumen pabean, kata Robert (20/5/16).

Pemanfaat fasilitas deklarasi inisiatif, harus memenuhi persyaratan. Antara lain, pada saat penyampian PIB, importir wajib mencantumkan data barang yang diimpor (future trading) dengan harga future atau mengandung royalty/procceds, perkiraan harga future atau nilai royalty/procceds, serta tanggal penyelesaian (harga futures paling lambat 45 hari dan royalty/procceds paling lambat satu tahun sejak tanggal PIB.

Harus Penuhi 3 Kewajiban

Selain itu, impor harus memenuhi tiga kewajiban pada saat post clearance. Yaitu, kewajiban melakukan pembayaran inisiatiatif, seperti pembayaran bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka impor atas harga atau biaya-biaya yang harus ditambahkan pada nilai transaksi, pada saat telah dapat ditentukan oleh importir (settlemen date) dalam rangka pemenuhan kewajiban atas deklarasi inisiatitif. Pembayaran ini dilakukan paling lambat tujuh hari sejak tanggal penyelesaian dengan menggunakan dokumen dasar.

Kewajiban berikutnya, importir harus menyampaikan dokumen pembayaran inisiatif dan bukti bayar kepada Kantor Bea dan Cukai tempat pemasukan barang selambatnya tujuh hari sejak tanggal pembayaran inisiatif. Kemudian terakhir adalah menata usahakan semua dokumen yang berhubungan dengan deklarasi inisiatif guna kepentingan audit kepabeanan. Audit kepabeanan digunakan sebagai pengujian kepatuhan importir atas ketentuan deklarasi inisiatif dan pembayaran inisiatif. Berdasarkan laporan hasil audit selama 5 tahun (2011-2016), terdapat tagihan hasil audit atas kesalahan pemberitahuan nilai pabean karena royalty sebesar Rp 203 milyar.

Pembayaran inisiatif tidak berlaku, kata Robert, jika importir tidak melakukan deklarasi inisiatif, kecuali importir telah mengajukan PIB sebelum tanggal diberlakukan Permenkeu ini dan belum dilakukan penetapan kembali oleh pejabat Bea dan Cukai. Diharapkan kebijakan ini dapat dorong tingkat kepatuhan pengguna jasa kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban kepabenanan yang berlaku, sekaligus memberikan kepastian berusaha dan hukum bagi importir yang melakukan deklarasi inisiatif sebagai bentuk kejujuran dalam penyampaian pemberitahuan kepabeanan, tegas Robert.

--- (Sumber : Warta Ginsi Edisi Oktober 2016 Nomor 3470/V) ---

Penghitungan KomPonen LoKaL Produk Seluler, Komputer GenGGam

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akhir Juli 2016 telah menetapkan ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk telepon seluler, komputer genggam (handheld), dan komputer tablet. Ketentuan baru yang tertuang melalui Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No.65/M-IND/PER/7/2016 tersebut dimaksudkan untuk mendorong peningkatan daya saing industri telepon seluler, komputer genggam (handheld) dan komputer tablet dalam negeri sesaui karakteristik industri yang bersangkutan.

Penilaian TKDN untuk produk ketiga kelompok produk tersebut dilakukan aspek manufaktur, pengembangan dan aplikasi. Aspek manufaktur dengan bobot 70% dari penilaian TKDN produk. Aspek pengembangan dengan bobot 20% dari penilaian TKDN produk dan aspek aplikasi dengan bobot 10% dari penilaian TKDN produk. Penilaian TKDN untuk manufaktur dilakukan dengan pembobotan material diberikan 95% dari penilaian aspek material. Tenaga kerja diberikan bobot 2% dari penilaian asek material dan mesin produksi diberikan bobot 3% dari penilaian aspek material.

Rincian pembobotan perhitungan TKDN untuk material berupa touch display module (TDM) mobules component dengan bobot 12,00%. Kamera depan 5,00%, kamera belakang 10,00%. Printed circuit board (PCB) main and sub printed circuit boards (PCB) component 13,00%. Printed circuit boards assembly (Surfacemont technology/SMT) 8,00%. Enclousure casing assembly set 10,00%, Flexible connector (FPC) 4,00%, baterai 8,00%, Vibration motor 3,00%, speacker and earpiece 3,00%, interconnect electrical wire assembly 3,00%, accessories berupa earphone 4,00%, charger 3,00%, cable 3,00%, dan pengemasan produk (packing) 3,00%.

Penghitungan TKDN untuk tenaga kerja dilakukan pembobotan dan bagi pekerja bidang perakitan (assembling) bobot 0,50%, pekerja pengujian (testing) 1,00%, dan pekerja pengemasan (packing) 0,50%.

Penghitungan TKDN untuk mesin produksi dengan mesin perakitan bobot 1,00% dan mesin

pengujian 2,00%. Penilaian TKDN aspek pengembangan untuk lisensi diberikan bobot 10% dari penilaian aspek pengembangan. Perangkat tegar (firmware) diberikan bobot 40% dari penilaian aspek pengembangan, desain industri bobot 20% dan desain tata letak sirkuit terpadu diberikan bobot 30% dari penilaian aspek pengembangan.

Kepemilikan lisensi atau hak kekayaan intelektual diberikan nilai TKDN 100% dari bobot penilaian TKDN untuk lisensi. Pengembangan yang menggunakan perangkat pengembang (software/hardware development kit) atau pola rancangan (refrence design) tanpa kepemilikan lisensi atau kepemilikan hak kekayaan intelektual diberikan nilai TKDN nol persen dari bobot penilaian TKDN untuk lisensi. Pengembangan penampilan antarmuka pengguna (man machine interface) bobot 10%, penggabungan perangkat lunak dengan system operasi (injection software) bobot 5% dan pengujian dan pencarian masalah (testing and debugging) bobot 5%.

Diajukn Melalui UP2

Produk telepon seluler, komputer genggam dan komputer tablet tertentu wajib memenuhi ketentuan nilai TKDN untuk aspek pengembangan minimal 8%, aplikasi embedded ke produk ketiga kelompok tersebut yang dihitung TKDN. Terdapat tujuh aplikasi embedded atau 14 aplikasi yang merupakan games, memiliki minimal 1 juta pengguna aktif (active user) masing-masing aplikasi. Proses injection software dilakukan di dalam negeri, menggunakan server yang berada di dalam negeri, memiliki toko aplikasi online (online application store) lokal dan harga cost, insurance and freight (CIF) minimal senilai Rp 6 juta.

Nilai TKDN dengan menggunakan skema perhitungan investasi baru atau berdasarkan propsosal investasi yang diajukan oleh pemohon atau nilai TKDN dihitung berdasarkan total investasi. Investasi sesuai proposal wajib direalisasikan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Investasi seniali Rp 250 milyar hingga Rp 400 milyar mendapatkan nilai TKDN sebesar 20%, investasi di atas Rp 400 milyar hingga Rp 500 milyar nilai TKDN sebesar 25%, investasi diatas Rp 550 milyar hingga Rp 700 milyar nilai TKDN sebesar 30%. Investasi sesar 35% dan investasi lebih dari dari Rp 1 trilyun mendapat nilai TKDN sebesar 40%.

Prorposal investasi diajukan kepada Dirjen melalui Unit Pelayanan Publik Kementerian Perindustrian (UP2). UP2 memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu 1 hari kerja. Terhadap permohonan yang telah lengkap, UP2 menyampaikan berkas permohonan kepada Dirjen dan terhadap yang belum lengkap mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Pemeriksaan keabsahan dan kesesuaian dokumen diakhiri dengan melakukan pemeriksaan lapangan.

Dalam waktu 5 hari kerja setelah penyampaian permohonan oleh UP2, Direjn menerbitkan surat persetujuan penilaian TKDN, kalau permohonan sudah lengkap dan benar atau surat penolakan apabila permohonan belum lengkap atau tidak benar. Pemohon menyampaikan surat persetujuan tersebut kepada surveyor untuk dilakukan penilaian TKDN. Hasil penilaian TKDN yang dilakukan surveyor dituangkan dalam laporan pelaksanaan verifikasi yang selanjutnya disampaikan kepada menteri dengan tembusan kepada pemohon. Berdasarkan laporan pelaksanaan verifikasi, Menteri menerbitkan sertifikasi TKDN yang berlaku selama 2 tahun.

Perhitungan Nilai TKDN Smartphone 4G

Pada rapat Penyusunan Konsep Rancangan Perhitungan Nilai TKDN untuk produk Telepon Seluler khususnya Smartphone 4G di Gedung Kementerian Perindustrian di Jakarta, Selasa, (31/5) disepakati dua skema/jalur yang dapat dipilih yaitu jalur piranti lunak (software) dan jalur manufaktur atau jalur piranti keras.

Rapat lanjutan pada Selasa, (7/6) lebih fokus pada penyusunan konsep untuk jalur manufakturnya. Rapat dipimpin langsung I Gusti Putu Suryawirawan, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) dan dihadiri beberapa pabrikan merek lokal maupun merek global seperti Samsung dan beberapa asosiasi Mastel, APSI, Gabel, akademisi dll.

Sebagai latar belakang, Edisi Komite Mei-Juni 2016 sempat wawancara Putu (7/4) dan ketika itu skemanya masih ada 5 skema pilihan 0%, 25%,50%, 75% dan 100% TKDN dengan masing masing komposisi hardware dan software smartphone 4G. Jadi perhitungan TKDN ini berubah sangat dinamis setahun terakhir ini, padahal pada akhir 2015 masih digunakan hanya satu skema yaitu skema manufacturing yang mendorong banyak merek lokal dan Samsung segera membangun pabriknya tau bekerjasama untuk menyiapkan perakitan yang dapat menghasilkan nilai TKDN 20% untuk produk smartphone 4G, yang mulai diberlakukan 1 Januari 2016.

Rapat Penyusunan Rancangan Perhitungan Nilai TKDN Smartphone 4G di Gedung Kemenperin di Jakarta, Selasa, (31/5)

Ada beberapa merek ponsel nakal yang melihat potensi loophole ini dengan menurunkan (downgrade) speksnya menjadi ponsel 3G saja, agar bisa masuk pasar RI tanpa harus memenuhi sertifikasi TKDN yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2016 ujar Lee kepada Komite.ID (7/6).

Produk Huawei agar bisa memenuhi persyaratan TKDN bekerjasama dengan PT Panggung Elektrik Citrabuana selaku pemberi layanan manufaktur elektronik (EMS) mencapai produksi 1 juta unit perangkat smartphone 4G memenuhi TKDN 20% untuk 2016 dan meningkat menjadi 30% pada 2017. Kapasitas perakitan yang dimiliki oleh PT Panggung mencapai 2,88 juta unit pertahun dengan 6 lini produksi, ujar Ali Subroto, Presiden Direktur PT Panggung dan Ketua Umum APSI (Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia).

Pada rapat penyusunan TKDN Manufaktur (7/6) yang dipimpin langsung oleh Dirjen ILMATE dan dihadiri oleh majoritas perakit besar RI baik lokal maupun Global seperti Samsung, Oppo dll bahwa skema software hanya berlaku bagi ponsel dengan harga pasar diatas $600 (sekitar Rp 7.8 juta). Artinya, hanya produk smartphone sangat high end dan prinsipalnya harus sudah melakukan investasi R&D pengembangan di Indonesia bukan hanya janji diatas kertas dengan perijinan TPP yang dikeluarkan oleh Dirjen ILMATE, Kementrian Perindustrian.

Samsung kecewa terhadap perubahaan dari awalnya kesepakatan TKDN skema hardware pada 2015 dimana beberapa perusahaan seperti Samsung, Huawei, Oppo dan merek lokal Evercoss, Advan dll, yang sudah mengurus TKDN manufakturnya untk kemudian kesepakatan TKDN ini dirubah awalnya menjadi 5 skema hardware software, kemudian terakhir 2 skema hardware software , sehingga pemerintah dinilai tidak konsisten, ujar Lee Kang Hyun, Vice Presiden (SEIN) Samsung Electronics Indonesia (30/3) yang diulang pada pertemuan dengan Dirjen ILMATE (7/6).

Putu menanggapi bahwa perubahan dari skema tunggal hardware menjadi skema kombinasi hardware software adalah keputusan high level pemerintah, saat Rudiantara, Menteri Kominfo, Tom Lembong, Menteri Perdagangan mengunjungi Silicon Valley bersama rombongan Presiden Jokowi ke AS Februari yang lalu. Dimana beberapa perusahaan AS termasuk smartphone dan sosmed berjanji akan membuat investasi R&D dan Software segera di Indonesia, asalkan pemerintah juga memperhitungkan juga sebagai komponen tingkat kandungan lokal RI.

Bagi Samsung dan beberapa perusahaan yang sudah terlanjur investasi besar pabrik perakitan di Indonesia merasa kecewa karena ketidak konsistenan dari Pemerintah dan mengkhawatirkan akan ditegur oleh prinsipalnya ketika ternyata tanpa investasi besar pabrik cukup R&D software juga diperkenankan penetrasi pasar Smartphone RI. Putu kemudian menjelaskan bahwa TKDN R&D software hanya diperkenankan untuk batas minimum harga hardware sementara ditentukan rapat kemarin US$ 600 atau sekitar Rp 8 juta, namun dibawah Rp 8 juta hanya ada satu pilihan yaitu jalur TKDN manufacturing.

Diskusi beralih pada loop hole yang dimanfaatkan oleh perusahaan oknum yang ditenggarai mengelabui pemerintah dengan membuat speks ponselnya dari 4G menjadi 3G,sehingga bebas masuk tanpa harus memenuhi aturan TKDN, karena aturan TKDN hanya untuk ponsel smartphone 4G. Putu menjelaskan bahwa Pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan IMEI (International Mobile Identity) bersama Kementrian Kominfo sehingga tidak ada beredar produk selundupan, parallel impor atau impor yang men downgrade ponsel dari 4G menjadi 3G.

IMEI adalah identitas unik setiap ponsel dari pabriknya, sehingga jika ada parallel impor atau impor yang illegal akan dikontrol oleh Kementrian Perindustrian melalui IMEI ini. Sepertinya peraturan TKDN ini masih akan terus berubah (dinamis) seiring dengan lobi lobi yang dilakukan masing masing kubu merek lokal maupun global untuk dapat menguasai pasar smartphone di RI. Peraturan Regulasi Importir Produsen Wajib Investasi juga diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 41/M-DAG/PER/5/2016 perubahan dari Permendag 82/M-DAG/PER/12/2012 juga sempat

dibahas karena melengkapi rancangan peraturan TKDN ini.

Pengembang teknologi seluler domestic harus diberi akses untuk mengembangkan perangkat lunak mutakhir untuk mengejar target konten lokal, karena ekosistem supply chain komponen pabrikan perangkat keras belum mendukung, sehingga banyak komponen harus di impor dan kalau dipaksakan maka yang ada adalah pabrik perakitan hardware ujar Shannedy Ong, Country Manajer Qualcomm Indonesia disela sela peluncuran prosesor Snapdragon820 Qualcomm Indonesia untuk pasar Indonesia (31/3).

Qualcomm sudah membuka akses pengkodean software untuk mengoptimalkan penggunaan prosesor buatan Qualcomm dan menjajaki dengan beberapa pengembang software domestic. Awalnya Qualcomm akan member akses kepada prosesor menengah, meski juga membuka peluang akses produk premium seperti prosesor Snapdragon 820 yang tentu berada di kelas atas. Prosesor Snapdragon 820 sangat canggih untuk akses data dengan kecepatan tinggi karena dapat transmit data hingga 600Mbps sedangkan modem tercepat dipasar baru 300Mbps dan kecepatan koneksi di Indonesia belum mencapai 30Mbps.

Pasar smartphone di Indonesia sangat luractive dimana porsi penduduk usia dibawah 35 tahun sebanyak 60% dan merupakan sasaran dan teknologi 4G menjadi primadona di pasar Asean. Menurut Gfk kepada Komite.ID pada pameran Indocomtech 2015 bahwa Pasar Smartphone di Indonesia mencapai jumlah 35 juta (2016) dengan nilai Rp 60 Triliun (2016), dapat dihitung defisit perdagangan impor ekspor (2016) dengan nilai TKDN 20% (2016)

--- (Sumber : Warta Ginsi Edisi Oktober 2016 Nomor 3470/V dan https://komite.id/2016)---